

## Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan

Nurchahyo Agung Pambudhi  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
Email: [adymakayasa@gmail.com](mailto:adymakayasa@gmail.com)

### Abstrak

Dilema keamanan adalah situasi di mana suatu negara berupaya meningkatkan keamanannya dengan memperkuat pertahanannya atau membentuk aliansi dengan negara lain. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, akan muncul berbagai ancaman, kesulitan, dan risiko yang sangat kompleks. Kekompleksan ancaman dan tantangan pertahanan negara secara konsisten dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di bidang ini. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerataan ekonomi saja namun juga bisa dilihat dengan pertahanan keamanan sebagai sebuah Ibukota Negara. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu. Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentu saja akan menciptakan pos-pos baru pengeluaran anggaran tiap tahunnya untuk mendukung Pembangunan ibukota negara baru di Penajam Passer utara atau mungkin akan mengorbankan pos- pos anggaran yang sudah ada. Penelitian kualitatif adalah metode utama untuk mengumpulkan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran yang dijatahkan ke Kementerian Pertahanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 130 tahun 2022. sebesar 144, 26 Triliun Rupiah Dimana mengalami penurunan yang termaktub dalam RAPBN 2024 menjadi 135,44 Triliun Rupiah. Pembangunan postur pertahanan negara bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Potensi ancaman terhadap Indonesia semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat. Postur pertahanan negara terus disesuaikan dan diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, serta ancaman nyata dan belum nyata. Bangkuatpokhan, juga dikenal sebagai Kekuatan Utama Pertahanan atau Minimum Essential Force (MEF), terdiri dari tiga rencana strategis yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan sebelumnya. Renstra I beroperasi dari tahun 2010–2014; Renstra II beroperasi dari tahun 2015–2019; dan Renstra III beroperasi dari tahun 2020–2024. Sejak 2012, pemerintah telah mengoptimalkan kebijakan zero growth untuk mengurangi biaya pegawai. Perombakan birokrasi pertahanan departemen sumber daya manusia adalah kebijakan pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan antara jumlah staf dan posisi mereka. Hal ini dinilai dapat mengatasi pengurangan anggaran pertahanan dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Ibukota Negara Baru (IKN). Tentunya dengan perimbangan anggaran penelitian dan pengembangan yang cukup agar penguatan Alpalhankam dalam negeri dapat teratasi dan mengurangi ketergantungan dari negara lain.

**Kata Kunci:** Geopolitik dan Geostrategi Kawasan, IKN, Anggaran Pertahanan

### Abstract

A security dilemma is a situation in which a country seeks to increase its security by strengthening its defenses or forming alliances with other countries. The development of a dynamic strategic environment will give rise to a very complex series of threats, challenges and risks. Geopolitical and geostrategic developments in the region always bring changes in the complexity of defense threats and challenges. The relocation of Indonesia's National Capital (IKN) is a very effective thing not only seen from the perspective of economic equality but can also be seen in terms of security and defense as a National Capital. . This was reinforced by the signing of Law number 3 of 2022 concerning National Capital (UU IKN) which was signed and officially promulgated on February 15 2022. The move of the national capital from Jakarta to Kalimantan will of course create new budget expenditure posts each year to support the development of a new state capital in North Penajam Passer or perhaps will sacrifice existing budget posts. The method used is qualitative research, with document review as the

main data collection technique. Analysis results, according to Presidential Regulation no. 130 of 2022, the Ministry of Defense's budget reallocation is 144.26 trillion Rupiah, which has decreased as stated in the 2024 RAPBN to 135.44 trillion Rupiah. The development of the country's defense posture aims to strengthen the country's defense capabilities. Potential threats to Indonesia are increasingly complex and diverse, requiring strong state defense capabilities. The country's defense posture continues to be adjusted and directed to be able to respond to various possible challenges, as well as real and unreal threats. The Ministry of Defense has previously prepared a strategic plan for the development of the Main Defense Force (Bangkuatpokhan) or better known as the Minimum Essential Force (MEF), which consists of three strategic strategic plans. Strategic Plan I started in 2010-2014, Strategic Plan II in 2015-2019 and Strategic Plan III in 2020-2024. The government's policy to reduce employee costs includes optimizing the zero growth policy implemented since 2012. The government's policy is to overhaul the HR department's defense bureaucracy which aims to maximize quality rather than quantity to achieve a balance between the number of people and the number of posts. This is considered to be able to overcome the reduction in the defense budget in order to support the acceleration of the Development of the New National Capital (IKN). Of course, with a balanced research and development budget that is sufficient, strengthening domestic defense and security equipment can be resolved and reduce dependence on other countries.

Keywords: Geopolitics and regional geostrategy, IKN, defense budget.

**Keywords:** Geopolitics And Regional Geostrategy, IKN, Defense Budget



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari fokus keamanan murni pada negara dan perbatasannya, menggunakan kekuatan militer sebagai strategi untuk menjaga stabilitas nasional, dan juga pada aktor individu, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, yang juga meluas ke aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan. kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang menitikberatkan pada militer dinilai belum mampu memberikan jaminan keamanan kepada warga negara. Mulai saat ini, arah keamanan berubah dari negara ke individu, dan ancaman tidak lagi terbatas pada ancaman militer saja, namun juga ancaman non-militer. Gagasan keamanan manusia juga memungkinkan keamanan dan pembangunan bersinggungan. Penetapan kebijakan pertahanan, khususnya yang berkaitan dengan upaya membangun keamanan nasional, memerlukan analisis yang mendalam terhadap tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (ipoleksosbud). Aspek-aspek ini perlu dipertimbangkan pada tingkat nasional, regional dan internasional. Sebab potensi ancaman bisa muncul pada aspek tersebut. Berbagai ancaman menjadi semakin kompleks, terutama di era globalisasi, dimana kerja sama dan pertukaran antar negara serta pertumbuhan ekonomi antar negara menjadi semakin penting.

Keamanan nasional adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara atau negara dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya, termasuk upaya ekonomi, militer, politik, dan diplomasi. Salah satu hal terpenting yang membedakan manajemen keamanan di negara maju dan berkembang adalah konteks pembangunan bangsa. Hampir semua negara berkembang masih mempunyai permasalahan dalam pembangunan bangsa. Meskipun negara-negara maju telah menyelesaikan pembangunan bangsa, banyak negara berkembang yang masih disibukkan dengan permasalahan dalam negeri. Begitu juga dengan Indonesia, sebagai negara berkembang Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang mapan, selain itu penguatan pertahanan menjadi masalah tersendiri. Namun wacana pemindahan ibukota negara seperti menjadi hal yang dianggap perlu bagi pemerintah Indonesia namun hal ini harus dilihat juga dari sisi pertahanan negara.

Wacana pemindahan ibu kota negara sudah cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 secara langsung mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kutai kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru nantinya. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan ibu kota negara yang bernama Nusantara sebagai ibu kota negara serta pembentukan otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini menyisakan pertanyaan besar, bagaimanakah cara pembiayaan ibukota negara ini yang tentunya akan memakan biaya yang sangat besar. Hal ini tentu saja akan menciptakan pos-pos baru pengeluaran anggaran tiap tahunnya untuk mendukung Pembangunan ibukota negara baru di Penajam Passer utara atau mungkin akan mengorbankan pos- pos anggaran yang sudah ada.

Dengan perubahan strategis, yang akan muncul dewasa ini dari berbagai ancaman, tantangan, dan risiko yang sangat kompleks. Dengan setiap perkembangan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut dari sudut pandang geopolitis dan geostrategis, maka kompleksitas ancaman dan masalah pertahanan negara semakin kompleks. Setiap bagian dari sistem pertahanan negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang kompleksitas ancaman tersebut. Oleh karena itu, anggaran pertahanan berdampak pada sistem pertahanan di Tengah-Tengah Pembangunan Ibukota Negara Baru (IKN). Ini karena strategi dan kebijakan pertahanan yang terus dibuat oleh Departemen Pertahanan membutuhkan dukungan alutsista dari anggaran pertahanan. Anggaran Kementerian Pertahanan dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja material, dan belanja modal. Dimana kesemuanya itu dibagi oleh 5 Unit kerja kelembagaan yaitu : Kemenhan, Mabesad, mabesal, Mabesau, dan Mabes TNI Dimana memiliki porsi anggaran yang lebih besar untuk belanja pegawai daripada dua komponen lainnya. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp131,78 miliar kepada Kementerian Pertahanan pada tahun 2023. Nilai tersebut turun 1% dibandingkan perkiraan tahun 2022 sebesar Rp 133,41 triliun. Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 sebagian besar dialokasikan untuk program dukungan manajemen atau setara dengan Rp79,1 triliun (59,96%) dari total anggaran. Anggaran terbesar kedua adalah untuk program modernisasi sarana dan prasarana pertahanan, program utama sistem persenjataan (Al-Sista), non-Ar-Sista, dan senilai Rp 35,88 triliun (27,2%).

Ada pula anggaran Kementerian Pertahanan untuk program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit senilai Rp11,04 triliun (8,37%); untuk program pelaksanaan tugas TNI Rp4,34 triliun (3,29%); untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan Rp1,06 triliun; serta untuk program lainnya sebesar Rp501,9 miliar. Kementerian Pertahanan sebelumnya memiliki rencana strategis untuk meningkatkan kekuatan pertahanan utama, yang dikenal sebagai Bangkuatpothan, atau MEF. Rencana strategis-I berlangsung dari 2010 hingga 2014, Rencana strategis-II berlangsung dari 2015 hingga 2019, dan Rencana strategis-III berlangsung dari 2020 hingga 2021. Untuk menjadi kekuatan yang dihormati di kawasan ASEAN dan di seluruh dunia, strategi ini bertujuan untuk memodernisasi sistem pertahanan utama Indonesia. Pertahanan militer adalah mempersiapkan pertahanan umum,

mempersiapkan pertahanan aktif, dan mengembangkan pertahanan secara mendalam untuk menghadapi ancaman. Tulisan ini mengulas bagaimana dampak Anggaran Pertahanan ditengah-tengah Pembangunan pemindahan Ibukota Negara Baru di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur terhadap Sistem Pertahanan Negara. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan inspirasi bagi Bangsa Indonesia untuk membangun industri pertahanan sendiri, terutama untuk terus mengembangkan teknologi pertahanan yang sesuai dengan tipe wilayah pertahanan negara secara geografis, dengan memanfaatkan anggaran pertahanan yang terbatas, dan selalu berusaha menjadi negara pencipta industri pertahanan guna mendukung penguatan ekonomi pertahanan yang mandiri untuk mendukung sistem pertahanan negara yang solid.

Permasalahan: Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menciptakan pos-pos baru pengeluaran anggaran tiap tahunnya untuk mendukung Pembangunan ibukota negara baru di Penajam Paser utara atau mungkin akan mengorbankan pos- pos anggaran yang sudah ada. Potensi ancaman terhadap Indonesia semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat. Hal inilah yang kemungkinan akan menjadi permasalahan yang menurut penulis akan menjadi ancaman dalam pemenuhan anggaran pertahanan dalam rangka percepatan Pembangunan Ibukota negara baru dimana membutuhkan yang tidak sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari potensi terpakainya dukungan anggaran pertahanan yang digunakan dalam proses percepatan Pembangunan Ibukota negara baru dihadapkan dengan keadaan geopolitik dan geostrategis dunia yang menuntut perkuatan system pertahanan nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif untuk menganalisisnya, dengan studi pustaka sebagai sumber data utama. Jurnal, buku, arsip, surat kabar, internet, dan publikasi perdagangan online juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang sesuai, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang sesuai juga.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan—tepatnya di wilayah Kutai Kertanegara hingga Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur—kini menjadi perhatian publik dan pemerintah. Pada tahun 1990-an pada masa orde baru, pemindahan ibu kota negara (IKN) sebenarnya merupakan salah satu diskusi yang sudah lama direncanakan oleh pemerintah. Pada akhirnya, pada tahun 2017, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, diskusi tentang pemindahan ibu kota kembali muncul. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi telah mulai mempertimbangkan pemindahan IKN secara serius saat ini. Ini terbukti dengan masuknya rencana pemindahan IKN dalam jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 (Ayundari, 2022). Pemindahan IKN harus segera dilakukan karena beberapa masalah. Pertama dan terpenting, masalah kepadatan populasi. DKI Jakarta adalah provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel berikut menunjukkan hal ini:

Tabel 1. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2019-2022 (Jiwa/Km<sup>2</sup>)

No.	Prov	2019	2020	2021
1.	DKI Jakarta	15.900	15.907	15.978
2.	Jabar	1394	1365	1379

3.	Banten	1338	1232	1248
4.	DIY	1227	1171	1185
5.	Jateng	1058	1113	1120

Sumber: BPS (2022)

Masalah kedua adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang parah di ibu kota Jakarta dapat menyebabkan negara kehilangan miliaran rupiah setiap tahun. Permasalahan ketiga adalah Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta, yang dianggap sebagai pusat segala sesuatu, termasuk pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dll. Akibatnya, pusat pembangunan lebih berkonsentrasi pada Pulau Jawa, yang sering disebut Javacentric. Situasi ini membuat Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia berkembang dengan cara yang berbeda. Risiko bencana alam merupakan masalah keempat. Gempa bumi dan banjir sangat mengancam Pulau Jawa. Selain itu, Jakarta berada di kawasan Cincin Api, sebuah wilayah yang memiliki aktivitas gunung berapi di sekitarnya. Pemerintah akan membangun ibu kota negara dalam lima tahapan, menurut undang-undang IKN, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam setiap tahapan, pemerintah akan berusaha untuk memastikan pelestarian alam, inklusi penduduk, dan pelestarian hutan dan alam Kalimantan. Ini terdiri dari lima langkah:

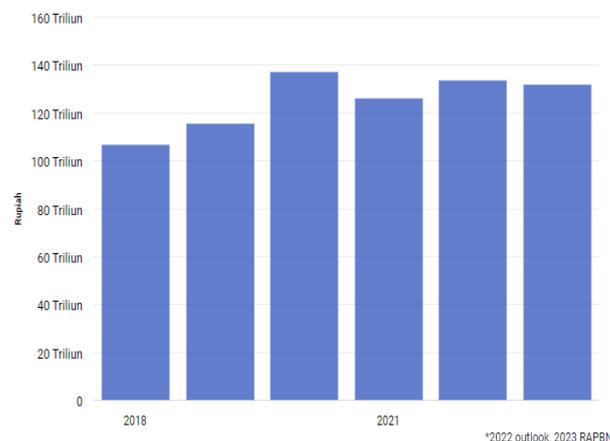
1. Tahap I (2022-2024)
  - a. Pembangunan kompleks istana Kepresidenan,
  - b. Perkantoran Pemerintah,
  - c. Perumahan ASN, Personil Hankam,
  - d. Telekomunikasi, Kelistrikan/Energi dan konektivitas/transportasi.
2. Tahap II (2025 - 2029)
  - a. Infrastruktur dan lingkungan (bandara, bendungan, dan lain-lain)
  - b. Pengembangan kawasan IKN
  - c. Perluasan kawasan (perkantoran, industri, universitas, hotel)
  - d. Pertahanan (Polri, BIN, BSSN, Kemhan)
3. Tahap III (2030 - 2034)
  - a. Infrastruktur dan lingkungan (sistem angkutan umum, pengelolaan air)
  - b. Pengembangan kawasan IKN
  - c. Perluasan beberapa kawasan serta pertahanan
4. Tahap IV (2035-2039)
  - a. Infrastruktur dan lingkungan (Kereta Api Regional, sistem pengelolaan air limbah, pembangunan solar farm, dan lain-lain)
  - b. Pengembangan 4 kawasan (KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur dan kawasan utara)
  - c. Perluasan beberapa kawasan serta pertahanan.
5. Tahap V (2040-2045)
  - a. Infrastruktur dan lingkungan (Infrastruktur dan transportasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multi guna).

Pemerintah pasti akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah menetapkan anggaran sebesar 466 triliun hingga 486 triliun untuk pembangunan ibu kota baru hingga tahun 2045. APBN hanya akan menanggung 20% dari anggaran ini, atau sekitar 88,54 triliun hingga 92,34 triliun, dan investasi swasta untuk mendukung pembangunan IKN akan menyumbang 80%. Ini karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Pemerintah masih harus menyelesaikan banyak agenda prioritas, salah satunya pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia selama dua tahun terakhir, termasuk Indonesia. Pemerintah harus mempertimbangkan situasi ekonomi yang sedang "gelap" ini saat menentukan prioritas anggaran belanja negara. Karena hal ini,

APBN tidak dapat menjadi sumber utama pembangunan IKN. Namun, di tengah ancaman perekonomian yang tidak stabil, pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2045. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk membangun ibu kota baru.

Berdasarkan keadaan seperti itu, hal ini akan menjadi potensi ancaman bagi system pertahanan di Indonesia, karena ada tiga rencana strategis yang membentuk rencana percepatan pembangunan ibukota: Rencana Strategis I dari 2010 hingga 2014, Rencana Strategis II dari 2015 hingga 2019 dan Rencana Strategis III dari 2020 hingga 2021. Memodernisasi sistem pertahanan utama Indonesia (Alutsista) adalah tujuan dari rencana ini. Ini akan membuat Indonesia menjadi kekuatan yang dihormati di kawasan ASEAN dan di seluruh dunia. Negara ke Utara Penjajem Passer, alokasi anggaran pertahanan berpotensi akan berkurang sehingga kemungkinan tercapainya postur ideal TNI atau MEF (Minimum Essential Force) menjadi tidak tercapai berdasarkan yang Terdiri dari tiga rencana strategis, Rencana Strategis I berlangsung dari 2010 hingga 2014, Rencana Strategis II berlangsung dari 2015 hingga 2019 dan Rencana Strategis III berlangsung dari 2020 hingga 2021. Untuk menjadi kekuatan yang dihormati di kawasan ASEAN dan di seluruh dunia, strategi ini bertujuan untuk memodernisasi sistem pertahanan utama Indonesia. Walaupun rencana pemerintah Indonesia saat ini besar tertuju pada percepatan Pembangunan IKN, namun pemerintah juga tidak boleh mengenyampingkan sektor pertahanan dan keamanan demi tercapainya juga postur TNI yang ideal. Pemerintah harus memberikan uang melalui anggaran pertahanan untuk memperkuat dan mempertahankan pertahanan negara terhadap ancaman militer fisik dan mental. Rencana pembangunan harus mendukung pembangunan pertahanan saat anggaran dialokasikan. Anggaran pertahanan yang sebenarnya tidak membiayai operasi tempur, pemeliharaan alutsista, dan pengembangan kekuatan pertahanan.

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mendukung tugas pertahanan dalam negeri, seperti mengatasi konflik dan menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar dan terdepan, dan membantu pemerintah dalam menangani bencana alam di berbagai wilayah. Pada tahun-tahun mendatang, diharapkan masalah pertahanan akan semakin kompleks. Sebaliknya, perubahan dalam pendekatan pertahanan negara menyebabkan peningkatan bahaya nyata dan palsu. Oleh karena itu, dana untuk pertahanan harus dialokasikan secara proporsional. Membangun kekuatan dan profesionalisme prajurit melalui ketersediaan alutsista yang mendukung kesiapan dan mobilitas adalah fokus pembangunan pertahanan mengingat tantangan misi pertahanan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memanfaatkan kekuatan pertahanan dasar. Untuk mencapai hal tersebut, proyeksi anggaran untuk pertahanan diperkirakan akan mencapai lebih dari 1% dari PDB dan meningkat secara bertahap dalam sepuluh tahun ke depan.



Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah mengalokasikan Rp131,78 miliar kepada Kementerian Pertahanan pada tahun 2023. Nilai tersebut turun 1% dibandingkan perkiraan tahun 2022 sebesar Rp 133,41 triliun. Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 sebagian besar dialokasikan untuk program dukungan manajemen atau sebesar Rp 79,1 triliun (59,96%) dari total anggaran. Anggaran terbesar kedua dialokasikan untuk program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alusista), yaitu sarana dan prasarana pertahanan dan alutsista, senilai Rp35,88 triliun (27,2%). Selain itu, Kementerian Pertahanan mengalokasikan Rp11,4 triliun (8,37%) untuk program peminatan dan kesejahteraan prajurit, Rp4,34 triliun (3,29%) untuk program pelaksanaan tugas TNI, dan Rp1,06 triliun untuk program riset pertahanan, industri, dan pendidikan tinggi. Ini juga berlaku untuk program lain senilai Rp 501,9 miliar. Berikut ini beberapa output strategis fungsi pertahanan dalam RAPBN 2023:

1. Operasi militer selain perang (OMSP).
2. Pembangunan rumah dinas prajurit
3. Dukungan pengadaan alutsista
4. Pemeliharaan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut
5. Pengadaan/penggantian kendaraan tempur
6. Penguatan cadangan pangan nasional

Sementara tantangan pada fungsi pertahanan yang harus diantisipasi adalah:

1. Kontrak dan perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan pengadaan alutsista yang diproduksi di luar negeri belum optimal.
2. Tindak kejahatan di laut, penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF), pelanggaran lintas negara, dan kurangnya pengamanan navigasi masih menjadi masalah.
3. Belum ada mekanisme yang memungkinkan informasi serangan siber antar-stakeholder diintegrasikan dan dibagikan.

Seiring dengan tingkat ancaman yang meningkat, termasuk kebutuhan akan pemeliharaan dan pengoperasian alutsista yang semakin canggih, kebutuhan akan dana pertahanan akan terus meningkat. Seiring pertumbuhan ekonomi nasional, alokasi anggaran mungkin akan meningkat. Anggaran pertahanan yang proporsional tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan negara dan memberikan efek jera, tetapi juga berdampak pada stabilitas dan kelancaran pembangunan nasional. Salah satu aspek yang dikembangkan adalah struktur organisasi di dalam gedung. Kekuatan staf mengacu pada kebijakan zero growth dan right-sizing, bahkan ketika terjadi pengembangan dan pengembangan organisasi, kekuatan staf tetap konstan namun kualitas terus meningkat. Pengembangan industri militer dalam negeri adalah cara untuk mencapai MEF. Dalam upaya negara untuk membangun sistem pertahanan yang mandiri, industri pertahanan dalam negeri merupakan bagian penting. Ini berkaitan dengan menghilangkan ketergantungan politik terhadap negara lain dan memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik lokal. Terbukti bahwa pertumbuhan industri pertahanan domestik berkontribusi pada pengembangan sistem pertahanan dan modernisasi alutsista di India dan Tiongkok, yang saat ini sedang berkembang menjadi kekuatan militer Asia. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah meluncurkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri pertahanan negara tersebut. Undang-undang ini sedang mempercepat program pemenuhan kebutuhan minimum kekuatan militer. Jika ini ada di tangan Anda. Untuk mempercepat pengembangan IKN, Kementerian Pertahanan harus menyiapkan tindakan konkrit. Salah satunya adalah apakah tenggat waktu untuk

menyelesaikan rencana strategis dapat diperpanjang hingga tahun berikutnya. Manfaat Sektor Pertahanan: Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan sektor pertahanan sangat penting. Oleh karena itu, Indonesia berada di lokasi geopolitik yang sangat strategis, dan posisinya sesuai dengan dinamika perang dunia.

Selama beberapa dekade mendatang, setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara yang tersisa yang akan mendominasi kekuatan politik dan ekonomi dunia. Namun, internalisasi dan integrasi Tiongkok yang meningkat sejak tahun 1970an sebenarnya secara bertahap mengikis gagasan bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya tunggal. Seiring dengan ketidakstabilan politik Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok secara bertahap menggantikan Amerika Serikat sebagai andalan perekonomian global. Dalam beberapa kesempatan, kedua negara telah secara terbuka menyatakan perang, dengan alasan konflik diplomatik dan perebutan supremasi wilayah. Klaim teritorial di Laut Cina Selatan adalah salah satu titik konflik dan arena perkelahian antara dua negara. Beberapa wilayah satelit, termasuk Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Indonesia, mengklaim Laut Cina Selatan sebagai "aset" strategis karena memiliki banyak cadangan mineral dan sumber daya laut. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak meningkatnya ketegangan antara dua wilayah maritim utama—Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, perang proksi akan memiliki dampak yang paling signifikan di berbagai sektor, jika perselisihan ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Industri pertahanan harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan program pengadaan pertahanan Kementerian Pertahanan. Untuk membuat industri pertahanan memiliki kemampuan inti yang berdaya saing di tingkat regional dan global, perlu ada kesepakatan di seluruh negara. Untuk mencapai kesepakatan ini, lembaga yang terlibat langsung dalam pengadaan alutsista, terutama Kementerian Pertahanan, TNI, dan produsen alutsista dalam negeri yang membangun fasilitas pertahanan berbasis industri pertahanan dalam negeri, harus bekerja sama sebaik mungkin. Paling tidak dengan meningkatkan pertahanan yang kuat dan efektif di wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kekuatan pertahanan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan masih sangat lemah. Selain masalah eksternal, Indonesia saat ini juga menghadapi masalah internal, seperti separatisme dan terorisme. Peran sektor pertahanan sangat penting untuk menghapus separatisme dan terorisme serta mendukung kedaulatan negara. Gerakan separatis dan teroris merupakan ancaman nyata terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan seringkali menghambat kemajuan negara. Selain itu, memperkuat pertahanan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan energi di luar wilayah Indonesia. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan saat mengelola anggaran pertahanan termasuk Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan saat mengelola anggaran pertahanan:

1. Perencanaan Strategis: Memiliki perencanaan strategis yang jelas yang mencakup identifikasi kebijakan pertahanan, ancaman potensial, dan kebutuhan pertahanan jangka panjang.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga tingkat transparansi tinggi dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan kepercayaan publik dan mendukung akuntabilitas. Melakukan audit secara rutin untuk memverifikasi penggunaan anggaran.
3. Pengawasan dan Pengendalian Biaya: Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian biaya yang efektif untuk mencegah pemborosan dan pemakaian dana yang tidak efisien. Mengelola kontrak dan proyek dengan cermat untuk menghindari peningkatan biaya yang tidak terduga.

4. Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan peralatan militer. Menyiapkan cadangan dana untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul.
5. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan: Menetapkan prioritas dalam pengadaan peralatan baru atau penggantian peralatan yang sudah usang. Merencanakan pemeliharaan peralatan dengan baik untuk memperpanjang umur pakai dan menghindari biaya perawatan yang tidak terduga.
6. Kolaborasi Internasional: Mengeksplorasi peluang kerjasama internasional dalam pengadaan senjata, teknologi pertahanan, dan pelatihan militer untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.
7. Pemeliharaan Personel: Memperhatikan kesejahteraan personel militer, termasuk gaji yang layak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan personel untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme.
8. Fleksibilitas Anggaran: Menciptakan anggaran yang cukup fleksibel untuk merespons perubahan keadaan atau kebutuhan mendesak yang mungkin muncul. Menyediakan cadangan dana untuk keperluan darurat.
9. Pengembangan Teknologi: Mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan untuk meningkatkan kemampuan militer dan memastikan keberlanjutan keamanan.
10. Pengukuran Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melakukan evaluasi rutin terhadap proyek-proyek dan kegiatan pertahanan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pengelolaan anggaran pertahanan dapat dilakukan dengan lebih efektif, mendukung tujuan strategis pertahanan, dan memastikan keberlanjutan keamanan nasional

## KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara berkembang Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang mapan, selain itu penguatan pertahanan menjadi masalah tersendiri. Namun wacana pemindahan ibukota negara seperti menjadi hal yang dianggap perlu bagi pemerintah Indonesia namun hal ini harus dilihat juga dari sisi pertahanan negara. Walaupun rencana pemerintah Indonesia saat ini besar tertuju pada percepatan Pembangunan IKN, namun pemerintah juga tidak boleh mengenyampingkan sektor pertahanan dan keamanan demi tercapainya juga postur TNI yang ideal. Menurut Renstra Pembangunan, anggaran pertahanan negara harus dialokasikan untuk memperkuat pertahanan negara dan mencegah ancaman militer fisik (nyata) dan psikologis (persepsi), baik internal maupun eksternal. Diharapkan bahwa alokasi anggaran pertahanan akan membantu memperkuat pertahanan negara sesuai dengan rencana pembangunan. Kebutuhan anggaran pertahanan sebenarnya sangat kecil, yang mendanai operasi, perawatan alutsista, dan pengembangan kemampuan pertahanan. Peningkatan anggaran diperlukan untuk mendukung tugas pertahanan dalam negeri, seperti mengatasi konflik dan menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar dan terdepan, dan membantu pemerintah dalam menangani bencana alam di berbagai wilayah. Untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah pasti akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kemampuan pertahanan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah harus memprioritaskan modernisasi alutsista karena ancaman internal dan eksternal agar tidak mengganggu rencana strategis dan tujuan nasional lainnya. Penataan organisasi adalah bagian

dari kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya personel. Meskipun organisasi berkembang dan berkembang, kekuatan personel tetap bergantung pada kebijakan zero growth dan right sizing, yang berarti bahwa kekuatan personel tetap ada tetapi kualitas tetap meningkat. Agar kebijakan ini diterapkan, penelitian dan pengembangan Alpalhankam baru harus didukung sepenuhnya. Ini akan memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara yang tidak perlu mengimpor alutsista dari negara lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfianzi, Dodiék. *Pengaruh Pembangunan Industri Pertahanan Terhadap Pertahanan Negara*. Jurnal Teknik industri, Sistem informasi dan Teknik informatika, E-ISSN:2829-2693
- Avisha Feny, Guntur Eko Saputro R Lukman Yudho Prakoso. *Analisis Dampak Anggaran Pertahanan Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Sistem Pertahanan Negara*. Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan: Vol. 7 No. 1 Juni 2023
- Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015
- Hasan, Syaiful, Haeran. *Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Maritim*. Jurnal Sosio Dialektika 8 (1) (2023). P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, Siti Aisa. *Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 1. Januari – Juni 2020: 183 - 203
- Hidayah, Miftahul. *Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menarik investasi Asing Untuk Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru*. Universitas Sriwijaya. Juni 2023.
- Muhyiddin. *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning. Volume IV No. 2 –Juni 2020
- Prianggodo, Chandra Adjie. *Pembangunan IKN Sebagai Mercusuar strategis (Kajian Kritis dalam perspektif sustainable Development)*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik volume 8 no.1 Januari 2023.
- Saputra, Surya Dwi, Thomas Gabriel, Mhd Halkis. *Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara*. Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan. Jurnal Ekonomi Pertahanan. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021
- Sari, Galih Kartika. *Integrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Dan Daerah Penyangganya*. STANDAR: Better Standard Better Living – Vol. 1 No.2, Maret 2022.
- Siswantoro. *Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: : Studi Kepustakaan*. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1(1), 27–41.
- Siti Amila, Aditya Agung Nugraha, Ahmad Sukron, Farida Rohmah. *Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Sahmiyya | E-ISSN: 2963-8100. Vol 2, No 1 Mei Tahun 2023.
- Susdarwono, Endro Tri, Ananda Setiawan, Yonimah Nurul Husna. *Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke Masa*. E-ISSN : 2621-4105. Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1 Tahun 2020.
- Ulhaq, Mhd. Jundi Zia. Muhammad Darwis. Rudiadi. *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Inodonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Journal of Sharia and Law. Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h.277-296.